PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jln.Jend. Soeharto No 50 Telp/Fax (0387) 61213
W A I N G A P U

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR :400.3/400.3.13/2398/III/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumba Timur Tahun Pelajaran 2025/2026 dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
8. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1101);
12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 933);
13. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 Nomor 56);

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.

15. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP.
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
20. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

Pasal 2

SPMB bertujuan untuk:

a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Pasal 3

SPMB dilaksanakan secara:

a. objektif;
b. transparan;
c. akuntabel;
d. berkeadilan; dan
e. tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas:

a. TK;
b. SD;
c. SMP;

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. TK;
b. SD;
c. SMP

BAB II
PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu

Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 6

(1) Penerimaan Murid baru untuk SD, SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru.
(2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Jalur Domisili;
    b. Jalur Afirmasi;
    c. Jalur Prestasi; dan
    d. Jalur Mutasi.

Pasal 7

(1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikecualikan untuk SD.
(2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan untuk:
    a. Satuan Pendidikan kerja sama;
    b. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri;
    c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
    d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
    e. Satuan Pendidikan berasrama;
    f. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
    g. Satuan Pendidikan yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jalur penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dikhususkan bagi Satuan Pendidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.
(2) Persyaratan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. persyaratan umum; dan
    b. persyaratan khusus.

Paragraf 2

Persyaratan Umum

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. batas usia; dan/atau
b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Pasal 10

Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 11

(1) Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
(2) Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.

(3) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
   a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
   b. kesiapan psikis.
(4) Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
(5) Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
(6) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(7) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 12

Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;dan
b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

(1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 huruf a, dibuktikan dengan:
   a. akta kelahiran; atau
   b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
(2) Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dibuktikan dengan:
   a. ijazah; atau
   b. surat keterangan lulus.

Pasal 14

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 huruf a, dikecualikan untuk calon Murid:
   a. penyandang disabilitas;
   b. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
   c. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
   d. pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Paragraf 3

Persyaratan Khusus

Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

Pasal 16

(1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
(2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.

(3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
   a. meninggal dunia;
   b. bercerai; atau
   c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.

(4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

(5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

(6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
   a. bencana alam; dan/atau
   b. bencana sosial.

(7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

(8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
   a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
   b. jenis bencana yang dialami.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.

(2) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
   b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
   c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.

(3) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
   a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
   b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

(4) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.

Pasal 18

(1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
   a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
   b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

(3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

Pasal 19

(1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
(2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. prestasi akademik; dan/atau
    b. prestasi nonakademik.
(3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
    a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
    b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
(4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
(5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
    a. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ; atau
    b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
(7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
    a. calon Murid;
    b. penyelenggara lomba;
    c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
    d. pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 20

(1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuktikan dengan:
    a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
    b. sertifikat/piagam prestasi;dan/atau
    c. dokumen lain terkait prestasi.
(2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 21

(1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan pembobotan nilai atas:
    a. rapor;
    b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan; dan
    c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional
    d. prestasi di bidang seni , budaya, bahasa, olahraga dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 4 huruf b
(2) Selain penetapan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes terstandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (8).
(3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

Pasal 22

(1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
    a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali;

b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
   a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
   b. kartu keluarga.

(3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penerimaan Murid baru
Paragraf 1
Umum
Pasal 23

Perencanaan penerimaan Murid baru meliputi:
a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
b. penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
c. penyusunan petunjuk teknis penerimaaan murid baru oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
d. Pembentikan panitia penerimaan murid baru ;
e. Penyediaan aplikasi penerimaan murid baru secara daring; dan
f. Sosialisasi pelaksanaan penerimaan murid baru.

Paragraf 2
Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru
Pasal 24

(1) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.

(2) Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Kepemudaan da Olahraga sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan:
   a. sebaran Satuan Pendidikan;
   b. sebaran domisili calon Murid; dan
   c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.

(3) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode:
   a. pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan;
   b. Pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administrative terkecil domisili murid;
   c. metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.

(4) Metode penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ini.

Pasal 25

(1) Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan dilakukan melalui pemetaan dan titik koordinat Satuan Pendidikaan.

(2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
   a. kondisi geografis dan;
   b. Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten kota.

Pasal 26

(1) Perhitungan sebaran domisili calon murid sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid.
(2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
(3) menggunakan data dari aplikasi dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
(4) mempertimbangkan kemudahan akses satuan pendidikandari domisili calon murid;
(5) mempertimbangkan domisili calon murid berada di daerah perbatasan provinsi kabupaten kota dan;
(6) memperhatikan data Dinas Sosial bagi calon murid:
    a. yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
    b. penyandang disabilitas

Pasal 27

(1) Perhitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf c berdasarkan:
    a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
    b. proyeksi jumlah calon murid; dan
    c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan swasta dan satuan pendidikan yang diselenggakan oleh kementrian lain.
(2) Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu), dan kelas 7 (tujuh), pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
(3) Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung:
    a. jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD;
    b. jumlah lulusan SD/sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP;
(4) Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama.
(6) Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang dilibatkan dalam penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru sesuai dengan petunjuk teknis ini.
(7) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
    a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
    b. Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(8) Simulasi penghitungan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ini.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menyampaikan:
    a. hasil penghitungan daya tampung; dan
    b. penetapan wilayah penerimaan Murid baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat bulan Maret tahun berjalan.

(2) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau kementerian lainnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau kementerian lainnya, dan/atau media massa cetak/daring lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru

Paragraf 3
Penentuan Persentase Daya Tampung
Jalur Penerimaan Murid Baru
Pasal 29

(1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru untuk:
   a. Jalur Domisili;
   b. Jalur Afirmasi;
   c. Jalur Prestasi; dan
   d. Jalur Mutasi.
(2) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar:
   a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
   b. paling sedikit 40%(empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP;
(3) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
   a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
   b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP;
(4) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar:
   a. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP;
(5) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD dan SMP.

Pasal 30

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon murid.

Pasal 31

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung :

a. Potensi jumlah calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
b. potensi jumlah calon murid penyandang disabilitas.

Paragraf 4
Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru
Pasal 32

(1) Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:
   a. panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah; dan
   b. panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
(2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh kepala daerah.
(3) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
   a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Dukcapil;
c. Dinas Sosial; dan
d. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(4) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.

(5) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.

(6) Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

Paragraf 5

Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 33

(1) Sosialisasi penerimaan Murid baru dilaksanakan oleh:
a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
b. Satuan Pendidikan.

(2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
a. Satuan Pendidikan, termasuk operator Satuan Pendidikan;
b. musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan;
c. kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan;
d. musyawarah kerja pengawas Satuan Pendidikan;
e. orang tua/wali calon Murid.

(4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
a. orang tua/wali calon Murid; dan
b. calon Murid.

(5) Sosialisasi penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:
a. bimbingan teknis;
b. pertemuan komite sekolah;
c. forum kepala Satuan Pendidikan;
d. forum organisasi pendidikan;
e. penyampaian surat;
f. media sosial milik Kementerian;
g. media sosial milik Pemerintah Daerah;
h. media sosial milik Satuan Pendidikan;
i. papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
j. media massa setempat; dan/atau
k. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

(1) Pelaksanaan penerimaan Murid baru terdiri atas:
a. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
c. seleksi penerimaan Murid baru;
d. pengumuman penetapan Murid baru; dan
e. daftar ulang.

(2) Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 35

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka.
(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga bagi:
    a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
    b. Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6).
(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan mulai **Tanggal 5 Mei 2025**.
(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
    a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
    b. tanggal pendaftaran;
    c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
    d. jumlah ketersediaan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7);
    e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
    f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
(5) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Paragraf 3

Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 36

(1) Pendaftaran penerimaan Murid baru menggunakan mekanisme daring dan luring sesuai kesiapan masing – masing satuan pendidikan **dimulai Tanggal, 1 sampai 5 Juli 2025.**
(2) Penggunaan mekanisme daring dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang telah tersedia fasilitas jaringan di wilayahnya.
(3) Pendaftaran penerimaan Murid baru yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring yang telah disiapkan oleh Masing – Masing Satuan Pendidikan.
(4) Dalam menggunakan mekanisme secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
(5) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
    a. akses laman penerimaan Murid baru;
    b. pembuatan akun akses laman penerimaan Murid baru; dan
    c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.
(6) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
(7) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
(8) Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

Pasal 37

Selain melakukan pendaftaran penerimaan Murid Baru di wilayah penerimaan Murid Baru yang telah ditetapkan, calon murid dapat melakukan pendaftaran Murid Baru di luar wilayah penerimaan Murid Baru sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan Murid Baru.

Paragraf 4

Seleksi Penerimaan Murid Baru

Pasal 38

(1) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
   a. diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3); atau
   b. diserahkan calon Murid kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7).

(2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 39

(1) Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.

Pasal 40

(1) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
   a. usia; dan
   b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

(2) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
   a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;dan
   b. usia.

Pasal 41

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 42

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

a. hasil pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 43

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 44

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 45

(1) Pengumuman penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru **yang dilaksanakan pada Tanggal 7 Juli 2025.**
(2) Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
(3) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
(4) Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 46

(1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
(2) Penyaluran Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan penyelenggara Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara Satuan Pendidikan.

Pasal 47

(1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon Murid di Satuan Pendidikan swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan Negeri.
(2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.pembebasan biaya pendidikan; atas
b.pengurangan biaya pendidikan.
(3) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomitidak mampu
(4) Jenis dan besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kemampuan fiscal daerah.

Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 48

(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan **mulai Tanggal, 8 sampai 10 Juli 2025.**
(2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
(3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
(4) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
(5) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
    a. tidak diumumkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan daan Olahraga sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
    b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
    c. tidak melakukan daftar ulang.

Bagian Kelima
Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
Pasal 49

(1) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
    a. identitas Murid;
    b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
    b. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
(2) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

Pasal 50

(1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dna Olahraga sesuai dengan kewenangan **paling lambat sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025.**
(2) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
    a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
    b. jadwal pelaksanaan;
    c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
    d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
    e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
    f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
    g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
    h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
    i. pemutakhiran data Murid.
(3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kementerian melalui Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.
(4) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
    a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;

b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
c. petunjuk teknis di daerah;
d. jadwal pelaksanaan;
e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya penanganan/ penyelesaian;
k. pemutakhiran data Murid; dan
l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waingapu
pada tanggal : 26 Maret 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur

Erwin Pasande, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19720513 200012 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 400.3.13/2398/III/2025
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2025/2026

I. METODE PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU DAN PENGHITUNGAN DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

A. Metode Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru yang digunakan adalah Pendekatan Wilayah Administratif.

1. Penetapan Wilayah penerimaan Murid baru berdasarkan wilayah administratif Kecamatan.

a. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Kecamatan	Jumlah Rombel Kelas Awal	Jumlah Siswa Per Rombel	Daya Tampung	Keterangan
1	SD INPRES PRAIBAKUL	50303919	Haharu	1	28	28	
2	SD INPRES PRAILANGINA	50303917	Haharu	1	28	28	
3	SD INPRES WUNGA	50303891	Haharu	1	28	28	
4	SD NEGERI HAMBUANG	69855658	Haharu	1	28	28	
5	SD NEGERI KADAHANG	50303704	Haharu	1	28	28	
6	SD NEGERI KALAMBA	50305742	Haharu	1	28	28	
7	SD NEGERI NAPU	50303821	Haharu	1	28	28	
8	SD INPRES LAKOMBU	50303827	Kahaungu Eti	1	28	28	
9	SD INPRES MATAWAI MARINGU	50303849	Kahaungu Eti	1	28	28	
10	SD INPRES YUBUWAI	50303889	Kahaungu Eti	1	28	28	
11	SD NEGERI KALOKA	50305735	Kahaungu Eti	1	28	28	
12	SD NEGERI KAMALAPAU	60730084	Kahaungu Eti	1	28	28	
13	SD NEGERI KATAKA	50303718	Kahaungu Eti	1	28	28	
14	SD NEGERI LA OMANG	50303729	Kahaungu Eti	1	28	28	
15	SD NEGERI LATAPPU	70029947	Kahaungu Eti	1	28	28	
16	SD NEGERI MATAWAI KATINGGA	50305736	Kahaungu Eti	1	28	28	
17	SD NEGERI NARI	50303805	Kahaungu Eti	1	28	28	
18	SD NEGERI PRAI PAHADA	69855669	Kahaungu Eti	1	28	28	
19	SD INPRES LAIMETA	50305723	Kambata Mapambuhang	1	28	28	
20	SD INPRES MARADA MUNDI	50303850	Kambata Mapambuhang	1	28	28	
21	SD NEGERI LUKUWINGIR	60730085	Kambata Mapambuhang	1	28	28	

22	SD NEGERI LUMBUNG	50303722	Kambata Mapambuhang	1	28	28	
23	SD NEGERI NGARUKAHIRI	50303801	Kambata Mapambuhang	1	28	28	
24	SD NEGERI PENANG	50303797	Kambata Mapambuhang	1	28	28	
25	SD NEGERI TANA RIDU	50305737	Kambata Mapambuhang	1	28	28	
26	SD NEGERI TANATURA	69774673	Kambata Mapambuhang	1	28	28	
27	SD NEGERI WAIMBIDI	69774672	Kambata Mapambuhang	1	28	28	
28	SD INPRES KALU	50303875	Kambera	2	28	56	
29	SD INPRES KALUMBANG	50303874	Kambera	2	28	56	
30	SD INPRES MALUMBI	50303845	Kambera	2	28	56	
31	SD INPRES PADADITA	50303913	Kambera	2	28	56	
32	SD INPRES PALINDI MBURUNG	50303925	Kambera	1	28	28	
33	SD INPRES PAPINDUNG	50303923	Kambera	2	28	56	
34	SD NEGERI BIDIPRAING	50303709	Kambera	1	28	28	
35	SD NEGERI MAUHAU	69727872	Kambera	1	28	28	
36	SD NEGERI TANAU	69855653	Kambera	1	28	28	
37	SD INPRES MAUDOLUNG	50303847	Kanatang	1	28	28	
38	SD NEGERI KAHEMBI LANGGA	70050617	Kanatang	1	28	28	
39	SD NEGERI MONDU	50303761	Kanatang	1	28	28	
40	SD NEGERI NDAPAYAMI	50303804	Kanatang	1	28	28	
41	SD NEGERI NDATA	60730087	Kanatang	1	28	28	
42	SD NEGERI TAIMANU	50303794	Kanatang	3	28	84	
43	SD NEGERI TANGGEDU	50305743	Kanatang	1	28	28	
44	SD INPRES ANANJAKI	50303866	Karera	1	40	**40**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
45	SD INPRES KATUNDU	50303852	Karera	1	28	28	
46	SD INPRES PAULANGGA	50303921	Karera	1	28	28	
47	SD INPRES PRAIPAJURUNG	50303915	Karera	1	28	28	
48	SD INPRES PULAU SALURA	50303914	Karera	1	28	28	
49	SD NEGERI HANDAKA	50303708	Karera	1	28	28	
50	SD NEGERI PRAIMADITA	69774674	Karera	1	28	28	
51	SD NEGERI PRAIPAJURUNG	50303796	Karera	1	28	28	
52	SD INPRES LAIKONDANG	50303832	Katala Hamu Lingu	1	28	28	
53	SD INPRES LAILARA	50303831	Katala Hamu Lingu	1	28	28	
54	SD NEGERI MANDAS	50303721	Katala Hamu Lingu	1	28	28	

55	SD NEGERI MATAWAI IWI	50303720	Katala Hamu Lingu	1	28	28	
56	SD INPRES KAMALAPUTI	50303873	Kota Waingapu	3	28	84	
57	SD INPRES LUKUKAMARU	50303825	Kota Waingapu	1	28	28	
58	SD INPRES UMAMAPU	50303941	Kota Waingapu	3	28	84	
59	SD INPRES WAINGAPU 2	50303934	Kota Waingapu	4	40	**160**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
60	SD INPRES WAINGAPU 3	50303932	Kota Waingapu	2	28	56	
61	SD NEGERI LAINDATANG	69774675	Kota Waingapu	1	28	28	
62	SD NEGERI PADENGI IWI	69855652	Kota Waingapu	1	28	28	
63	SD NEGERI RAPAMANU	69774676	Kota Waingapu	1	28	28	
64	SD NEGERI WAINGAPU 1	50303818	Kota Waingapu	1	28	28	
65	SD NEGERI WAINGAPU 4	50303931	Kota Waingapu	3	28	84	
66	SD NEGERI WAINGGAI	50303817	Kota Waingapu	2	28	56	
67	SD INPRES MONDU LA PATAMA	50303842	Lewa	2	28	56	
68	SD INPRES NANGGA	50303840	Lewa	1	28	28	
69	SD INPRES NANGGA LINDI WATU	50303839	Lewa	2	28	56	
70	SD INPRES WUNDUT	50303892	Lewa	1	28	28	
71	SD NEGERI LAIKAMBELA	69855661	Lewa	1	28	28	
72	SD NEGERI MATAWAI KURANG	50305739	Lewa	1	28	28	
73	SD NEGERI MATAWAI PAWALI	50305738	Lewa	1	28	28	
74	SD NEGERI NDULALURI	50303803	Lewa	1	40	**40**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
75	SD NEGERI PALAHONANG	69855668	Lewa	1	28	28	
76	SDI KONDAMARA 2	50303834	Lewa	1	28	28	
77	SD INPRES KANGELI	50303870	Lewa Tidahu	1	28	28	
78	SD INPRES PRAIMARADA	50303916	Lewa Tidahu	1	28	28	
79	SD NEGERI LAI HAU	50303726	Lewa Tidahu	2	28	56	
80	SD NEGERI LAI KAKEREK	69855659	Lewa Tidahu	1	28	28	
81	SD NEGERI MAKARAPU	69855662	Lewa Tidahu	1	28	28	
82	SD NEGERI MONDU LAMBI	69855665	Lewa Tidahu	1	28	28	
83	SD NEGERI NJARA BARA	69855666	Lewa Tidahu	1	28	28	
84	SD NEGERI UMAMANU	50303820	Lewa Tidahu	1	28	28	
85	SD INPRES HARAY	50303878	Mahu	1	28	28	

86	SD INPRES KALALLA	50303876	Mahu	1	28	28	
87	SD NEGERI KAJU	70029944	Mahu	1	28	28	
88	SD NEGERI LAHIRU	69727871	Mahu	2	28	56	
89	SD NEGERI MAUTOLUNG	69855664	Mahu	1	28	28	
90	SD NEGERI MBAJIK	50305746	Mahu	1	28	28	
91	SD NEGERI PATAMAWAI	50303798	Mahu	1	28	28	
92	SD NEGERI WAIRARA	50305745	Mahu	1	28	28	
93	SD INPRES HILIWUKU	50303877	Matawai La Pawu	1	28	28	
94	SD INPRES LANGIRA	50303826	Matawai La Pawu	1	28	28	
95	SD INPRES MAHAMBALA	50303836	Matawai La Pawu	1	28	28	
96	SD INPRES WATUPATINJANG	50303912	Matawai La Pawu	1	28	28	
97	SD NEGERI KAMBAUNI	50305734	Matawai La Pawu	1	28	28	
98	SD NEGERI LAHUA	50303728	Matawai La Pawu	1	28	28	
99	SD NEGERI LAWINU	50305733	Matawai La Pawu	1	28	28	
100	SD NEGERI PAHULU BANDIL	69855667	Matawai La Pawu	1	28	28	
101	SD INPRES HAMBAWUTANG	50303879	Ngadu Ngala	2	28	56	
102	SD INPRES KAKAHA	50303837	Ngadu Ngala	1	28	28	
103	SD NEGERI KABANDA	50303705	Ngadu Ngala	1	28	28	
104	SD NEGERI KAKAHA	50303716	Ngadu Ngala	1	28	28	
105	SD NEGERI PRAIWITU	50303707	Ngadu Ngala	1	28	28	
106	SD NEGERI PRAURAMING	50305744	Ngadu Ngala	1	28	28	
107	SD INPRES MARADADITA	50303838	Nggaha Ori Angu	1	28	28	
108	SD INPRES POLIWALI	50303920	Nggaha Ori Angu	2	28	56	
109	SD INPRES PULUPANJANG	50303926	Nggaha Ori Angu	1	28	28	
110	SD NEGERI BIDIWAI	50305741	Nggaha Ori Angu	1	28	28	
111	SD NEGERI KILIMBATU	69774677	Nggaha Ori Angu	1	28	28	
112	SD NEGERI MBINU DITA	70030014	Nggaha Ori Angu	1	28	28	
113	SD NEGERI NGADULANGGI	50303802	Nggaha Ori Angu	1	28	28	
114	SD NEGERI UMAHAPI	50305740	Nggaha Ori Angu	1	28	28	
115	SD NEGERI WAITAMA	50303816	Nggaha Ori Angu	1	28	28	
116	SD NEGERI WAIWAKIHU	50303815	Nggaha Ori Angu	1	28	28	
117	SD INPRES KANANGGAR	50303872	Paberiwai	1	28	28	
118	SD INPRES KARERA JANGGA	50303868	Paberiwai	1	28	28	

119	SD INPRES PANJIR	50303924	Paberiwai	1	28	28	
120	SD INPRES WINUMURU	50303894	Paberiwai	1	28	28	
121	SD NEGERI KARERA JANGGA	50303865	Paberiwai	1	28	28	
122	SD NEGERI LA AU	50303730	Paberiwai	1	28	28	
123	SD NEGERI LAI MAHI	50303727	Paberiwai	1	28	28	
124	SD NEGERI LAIHOBU	69855660	Paberiwai	1	28	28	
125	SD NEGERI LAITAKU	50303812	Paberiwai	1	28	28	
126	SD NEGERI MATAWAI MANAMA	69855663	Paberiwai	1	28	28	
127	SD NEGERI MAUMARU	50303862	Paberiwai	1	40	**40**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
128	SD INPRES BENDA	50303867	Pahunga Lodu	1	28	28	
129	SD INPRES KURUWAKIHU	50303833	Pahunga Lodu	1	28	28	
130	SD INPRES MAUKAWINI	50303846	Pahunga Lodu	1	28	28	
131	SD INPRES MBURUNG	50303844	Pahunga Lodu	1	28	28	
132	SD INPRES NGALLU	50303823	Pahunga Lodu	1	28	28	
133	SD INPRES TANAMANANG	50303927	Pahunga Lodu	2	28	56	
134	SD NEGERI LAIWAHI	70029945	Pahunga Lodu	1	28	28	
135	SD NEGERI LAMBAKARA	50303723	Pahunga Lodu	1	40	**40**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
136	SD NEGERI LARAHAU	50305730	Pahunga Lodu	1	28	28	
137	SD NEGERI MATAWAI KATABA	50303719	Pahunga Lodu	1	28	28	
138	SD NEGERI PALANGGAY	69961528	Pahunga Lodu	1	28	28	
139	SD NEGERI TAMMA	50303807	Pahunga Lodu	1	28	28	
140	SD NEGERI TANDENING	69855670	Pahunga Lodu	1	28	28	
141	SD INPRES HAMING	50303929	Pandawai	1	28	28	
142	SD INPRES KAWANGU 1	50303851	Pandawai	2	28	56	
143	SD INPRES KAWANGU 2	50303933	Pandawai	2	28	56	
144	SD INPRES LAIPORI	50303829	Pandawai	1	40	**40**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
145	SD INPRES MENGGIT TIMBI	50303843	Pandawai	2	28	56	
146	SD INPRES PRAIKALOKAT	50303918	Pandawai	1	28	28	
147	SD INPRES WALAKIRI	50303930	Pandawai	1	28	28	
148	SD NEGERI HUDUMBURUNG	50305727	Pandawai	1	28	28	
149	SD NEGERI LAINDEHA	50305726	Pandawai	1	28	28	

150	SD NEGERI LINDI	50305724	Pandawai	1	40	**40**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
151	SD NEGERI MAUJAWA	50303731	Pandawai	1	28	28	
152	SD NEGERI PALINDI	50303799	Pandawai	1	28	28	
153	SD NEGERI PAPU	69774678	Pandawai	1	28	28	
154	SD NEGERI UMAJAWA	69863295	Pandawai	1	28	28	
155	SD NEGERI WATUMBAKA	50303813	Pandawai	2	28	56	
156	SD NEGERI WERA	50305725	Pandawai	1	28	28	
157	SD INPRES KANJILUMURU	50303869	Pinu Pahar	1	28	28	
158	SD INPRES OKATANA	50303881	Pinu Pahar	1	28	28	
159	SD INPRES UMANDUNDU	50303936	Pinu Pahar	1	28	28	
160	SD NEGERI KAMARU	69774679	Pinu Pahar	1	28	28	
161	SD NEGERI RAMUK	50303795	Pinu Pahar	1	28	28	
162	SD NEGERI WAHANG	50303819	Pinu Pahar	1	28	28	
163	SD INPRES KANDARA	50303871	Rindi	1	28	28	
164	SD INPRES KAYURI	50303835	Rindi	1	28	28	
165	SD INPRES TANARAING	50303939	Rindi	1	28	28	
166	SD INPRES TAPIL	50303937	Rindi	1	28	28	
167	SD NEGERI HANGGARORU	50303725	Rindi	1	40	**40**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
168	SD NEGERI KAMALA WATAR	50303706	Rindi	1	28	28	
169	SD NEGERI LAILANJANG	69774680	Rindi	1	28	28	
170	SD NEGERI MATAWAI KANORU	50305729	Rindi	1	28	28	
171	SD NEGERI NUSA	50305728	Rindi	1	28	28	
172	SD NEGERI TAMBURI	50303806	Rindi	1	28	28	
173	SD NEGERI TANALINGU	50303808	Rindi	2	28	56	
174	SD INPRES MAUBAKUL	50303848	Tabundung	1	28	28	
175	SD INPRES TANAMITING	50303928	Tabundung	1	28	28	
176	SD INPRES TARIMBANG	50303938	Tabundung	1	28	28	
177	SD INPRES WATURARA	50303895	Tabundung	1	28	28	
178	SD NEGERI BANGGAWATU	69774681	Tabundung	1	28	28	
179	SD NEGERI KAHEMBI	50303703	Tabundung	1	28	28	
180	SD INPRES LAIRURU	50303828	Umalulu	1	28	28	
181	SD INPRES MUTUNGGEDING	50303841	Umalulu	1	28	28	
182	SD INPRES UMABARA	50303940	Umalulu	1	40	**40**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian

183	SD INPRES WAIMARANG	50303935	Umalulu	1	28	28	
184	SD INPRES WATUPUDA	50303896	Umalulu	2	28	56	
185	SD NEGERI KANDANGU BUKU	50303717	Umalulu	2	28	56	
186	SD NEGERI LAIMANDAR	70029946	Umalulu	1	28	28	
187	SD NEGERI PADAMMU	50303800	Umalulu	1	40	**40**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
188	SD NEGERI PRAIWANGGA	69774682	Umalulu	1	28	28	
189	SD INPRES LAIPANDAK	50303830	Wulla Waijelu	1	28	28	
190	SD INPRES LUMBUMANGGIT	50303824	Wulla Waijelu	1	28	28	
191	SD INPRES PARANDA	50303922	Wulla Waijelu	1	28	28	
192	SD NEGERI KONDANAMU	69774684	Wulla Waijelu	1	28	28	
193	SD NEGERI LAITUTA	50303724	Wulla Waijelu	1	28	28	
194	SD NEGERI LUKUMIHI	50305732	Wulla Waijelu	1	28	28	
195	SD NEGERI TANJUNG NGUNJU	69774683	Wulla Waijelu	1	28	28	
196	SD NEGERI WAIMIMA	50305731	Wulla Waijelu	1	28	28	
197	SD NEGERI WALAKARI	50303814	Wulla Waijelu	1	28	28	
198	SD NEGERI WULLA	50303893	Wulla Waijelu	1	28	28	

b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta

No	**Nama Satuan Pendidikan**	**NPSN**	**Kecamatan**	**Jumlah Rombel Kelas Awal**	**Jumlah Siswa Per Rombel**	**Daya Tampung**	**Keterangan**
1	SD KATOLIK ANDALURI	50303859	Kota Waingapu	2	**56**	**56**	
2	SD KRISTEN NASIONAL PLUS KASIH AGAPE	50308464	Kota Waingapu	2	**56**	**56**	
3	SD MASEHI MBATAKAPIDU	50303735	Kota Waingapu	1	**28**	**28**	
4	SD MUHAMMADIYAH WAINGAPU	50303854	Kota Waingapu	1	**28**	**28**	
5	SD MASEHI WAINGAPU	50303714	Kota Waingapu	1	**28**	**28**	
6	SD CHARIS NATIONAL ACADEMY SUMBA	70030015	Kambera	1	**28**	**28**	
7	SD KATOLIK KAHAUNGU ETI	50303857	Kambera	1	**28**	**28**	
8	SD KATOLIK PRAIKUNDU	50303855	Kambera	2	**56**	**56**	
9	SD MASEHI KAMBANIRU 1	50303905	Kambera	2	**56**	**56**	
10	SD MASEHI KAMBANIRU 2	50303904	Kambera	1	**28**	**28**	
11	SD MASEHI LAMBANAPU	50303742	Kambera	1	**28**	**28**	

12	SD MASEHI LUMBUMENGGIT	50303739	Kambera	2	**56**	**56**	
13	SD MASEHI PAYETI 1	50303758	Kambera	3	**84**	**84**	
14	SD MASEHI PAYETI 2	50303757	Kambera	2	**56**	**56**	
15	SD MASEHI PAYETI 3	50303756	Kambera	1	**28**	**28**	
16	SD MASEHI PRAIWORA	69863296	Kambera	1	**28**	**28**	
17	SD KATOLIK PALAKAHEMBI	50303883	Pandawai	1	**28**	28	
18	SD MASEHI HAMING	50303907	Pandawai	1	**28**	28	
19	SD KATOLIK NGARU KANORU	50303884	Umalulu	1	**28**	28	
20	SD KATOLIK WANGA	50303898	Umalulu	1	**28**	28	
21	SD MASEHI MELOLO 1	50303745	Umalulu	1	**28**	28	
22	SD MASEHI MELOLO 2	50303746	Umalulu	1	**28**	28	
23	SD MASEHI PATAWANG	50303747	Umalulu	1	**28**	28	
24	SD MASEHI PAU	50303759	Umalulu	2	**56**	56	
25	SD MASEHI WANGA	50303711	Umalulu	1	**28**	28	
26	SD MASEHI PRAIYAWANG	50303752	Rindi	1	**28**	28	
27	SD PRAIPULUHAMU	50303853	Rindi	2	**56**	56	
28	SD MASEHI MATAWAI	50303737	Pahunga Lodu	2	**56**	56	
29	SD MASEHI MBURUKULU	50303733	Pahunga Lodu	1	**28**	28	
30	SD MASEHI BAING	50303909	Wulla Waijelu	1	**28**	28	
31	SD MASEHI LALINDI	50303743	Karera	1	**28**	28	
32	SD MASEHI TANARONG	50303750	Karera	1	**28**	28	
33	SD MASEHI KANANGGAR	50303903	Paberiwai	1	**28**	28	
34	SD MASEHI ANDUWATU	50303910	Matawai La Pawu	1	**28**	28	
35	SD MASEHI LAI META	50303760	Matawai La Pawu	1	**28**	28	
36	SD MASEHI LAIRONJA	50303744	Matawai La Pawu	1	**28**	28	
37	SD KATOLIK LINDI PINGU	50303886	Kahaungu Eti	1	**28**	28	
38	SD MASEHI KAMANGGIH	50303906	Kahaungu Eti	1	**28**	28	
39	SD MASEHI LAIMBONGA	50303822	Kahaungu Eti	1	**28**	28	
40	SD MASEHI MAURAMBA	50303736	Kahaungu Eti	1	**28**	28	
41	SD MASEHI LAILUNGGI	50303882	Pinu Pahar	1	**28**	28	
42	SD MASEHI TAWUI	50303732	Pinu Pahar	2	**56**	56	
43	SD MASEHI BILLA	50303908	Tabundung	1	**28**	28	
44	SD MASEHI LATANG	50303741	Tabundung	1	**28**	28	
45	SD MASEHI PRAINGKAREHA	50303755	Tabundung	1	**28**	28	
46	SD MASEHI TAPIL	50303749	Tabundung	1	**28**	28	

47	SD MASEHI WAIKANABU	50303715	Tabundung	1	**28**	28	
48	SD MASEHI KONDAMARA	50303900	Lewa	1	**28**	28	
49	SD MASEHI RAKAWATU	50303751	Lewa	1	**28**	28	
50	SD MASEHI LEWA PAKU	50303740	Lewa	2	**56**	56	
51	SD MASEHI WAI WEI	50303712	Lewa	1	**28**	28	
52	SD KATOLIK PRAIPAHA	50303897	Nggaha Ori Angu	1	**28**	28	
53	SD MASEHI MAKAMENGGIT	50303738	Nggaha Ori Angu	1	**28**	28	
54	SD MASEHI PRAIPAHA	50303754	Nggaha Ori Angu	1	**28**	28	
55	SD MASEHI KAPUNDUK	50303902	Haharu	1	**28**	28	
56	SD KATOLIK WOLIHI	50303899	Kanatang	1	**28**	28	
57	SD KATOLIK LONDA LIMA	50303858	Kanatang	1	**28**	28	
58	SD KATOLIK MARADA MBALAR	50303885	Ngadu Ngala	1	**28**	28	
59	SD MASEHI WAIRUNU	53303173	Ngadu Ngala	1	**28**	28	
60	SD KATOLIK ANDAWAI	50303887	Mahu	1	**28**	28	
61	SD KATOLIK LATALURI	50303856	Mahu	1	**28**	28	
62	SD MASEHI KAWUNGGAR	50303901	Lewa Tidahu	1	**28**	28	
63	SD MASEHI WATUMBELAR	50303710	Lewa Tidahu	1	**28**	28	
64	SD MASEHI TAWAKIHU	50303748	Katala Hamu Lingu	1	**28**	28	

c. Simulasi Daya Tampung Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Rumus Perhitungan Daya Tampung;

Daya Tampung = Jumlah Ruang Kelas 1 X 28 Murid maksimal dalam satu kelas.

DT = 304 x 28
= 8.512

Total Daya Tampung Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Sumba Timur adalah 8.512.

d. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri

No	**Nama Satuan Pendidikan**	**NPSN**	**Kecamatan**	**Jumlah Rombel Kelas Awal**	**Jumlah Siswa Per Rombel**	**Daya Tampung**	**Keterangan**
1	SMP NEGERI 1 HAHARU	50303764	Haharu	3	32	96	
2	SMP NEGERI SATAP NAPU	50305757	Haharu	1	32	32	
3	SMP NEGERI 1 KAHAUNGU ETI	50305750	Kahaungu Eti	3	32	96	

4	SMP NEGERI SATAP KALOKA	69878257	Kahaungu Eti	1	45	45	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
5	SMP NEGERI SATAP KATAKA	50305753	Kahaungu Eti	1	32	32	
6	SMP NEGERI 1 KAMBATA MAPAMBUHANG	50307985	Kambata Mapambuhang	1	32	32	
7	SMP NEGERI SATAP LAIMETA	69787670	Kambata Mapambuhang	1	32	32	
8	SMP NEGERI SATAP NGARUKAHIRI	50307981	Kambata Mapambuhang	1	32	32	
9	SMP NEGERI 1 KAMBERA	50307986	Kambera	5	32	160	
10	SMP NEGERI 1 WAINGAPU	50303786	Kambera	9	32	288	
11	SMP NEGERI 4 MAULIRU	50305764	Kambera	4	32	128	
12	SMP NEGERI SATAP PADADITA	50305751	Kambera	3	32	96	
13	SMP NEGERI 1 KANATANG	50308465	Kanatang	1	32	32	
14	SMP NEGERI 2 KANATANG	50305763	Kanatang	4	32	128	
15	SMP NEGERI 1 KARERA	50307987	Karera	1	32	32	
16	SMP NEGERI 2 KARERA	50303775	Karera	4	32	128	
17	SMP NEGERI SATAP HANDAKA	69774689	Karera	1	45	**45**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
18	SMP NEGERI SATAP PULAU SALURA	69774688	Karera	1	32	32	
19	SMP NEGERI SATAP MATAWAI IWI	50305758	Katala Hamu Lingu	2	32	64	
20	SMP NEGERI 1 WAINGGAI	50308469	Kota Waingapu	3	32	96	
21	SMP NEGERI 2 WAINGAPU	50303782	Kota Waingapu	9	32	288	
22	SMP NEGERI 3 WAINGAPU	50303781	Kota Waingapu	8	32	256	
23	SMP NEGERI 1 LEWA	50303763	Lewa	6	32	192	
24	SMP NEGERI 2 LEWA	50305762	Lewa	2	32	64	
25	SMP Negeri 3 Lewa	69899787	Lewa	1	32	32	
26	SMP NEGERI SATAP MATAWAI KURANG	50308466	Lewa	1	32	32	
27	SMP NEGERI 1 LEWA TIDAHU	50303784	Lewa Tidahu	2	32	64	
28	SMP NEGERI SATAP KANGELI	69899785	Lewa Tidahu	2	32	64	
29	SMP NEGERI SATAP PRAIMARADA	69727875	Lewa Tidahu	1	32	32	
30	SMP NEGERI 1 MAHU	50308468	Mahu	1	32	32	
31	SMP NEGERI 2 MAHU	70029964	Mahu	1	32	32	

32	SMP Negeri Satap Lahiru	69899786	Mahu	1	32	32	
33	SMP NEGERI SATAP PATAMAWAI	50305761	Mahu	1	32	32	
34	SMP NEGERI 1 MATAWAI LA PAWU	50305748	Matawai La Pawu	3	32	96	
35	SMP NEGERI SATAP HILIWUKU	69727873	Matawai La Pawu	1	32	32	
36	SMP NEGERI SATAP LANGIRA	50305755	Matawai La Pawu	2	45	**90**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
37	SMP NEGERI 1 NGADU NGALA	69893046	Ngadu Ngala	2	32	64	
38	SMP NEGERI SATAP KAKAHA	50305752	Ngadu Ngala	2	32	64	
39	SMP NEGERI 1 NGGAHA ORI ANGU	50305749	Nggaha Ori Angu	3	32	96	
40	SMP NEGERI 2 NGGAHA ORI ANGU	50307988	Nggaha Ori Angu	2	32	64	
41	SMP NEGERI SATAP PULUPANJANG	50308467	Nggaha Ori Angu	1	32	32	
42	SMP NEGERI SATAP WAITAMA	69774690	Nggaha Ori Angu	1	32	32	
43	SMP NEGERI 1 PABERIWAI	50303776	Paberiwai	2	32	64	
44	SMP NEGERI 2 PABERIWAI	70029943	Paberiwai	1	32	32	
45	SMP NEGERI SATAP LA AU	69878258	Paberiwai	2	32	64	
46	SMP NEGERI SATAP LAITAKU	69774691	Paberiwai	1	32	32	
47	SMP NEGERI 1 PAHUNGA LODU	50303780	Pahunga Lodu	5	32	160	
48	SMP NEGERI 2 PAHUNGA LODU	50307989	Pahunga Lodu	3	32	96	
49	SMP NEGERI SATAP LAMBAKARA	50305756	Pahunga Lodu	2	32	64	
50	SMP NEGERI SATAP TAMMA	50307983	Pahunga Lodu	1	32	32	
51	SMP NEGERI 1 PANDAWAI	50303778	Pandawai	8	32	256	
52	SMP NEGERI 2 PANDAWAI	50303783	Pandawai	3	32	96	
53	SMP NEGERI 3 PANDAWAI	69774687	Pandawai	2	32	64	
54	SMP NEGERI SATAP LAINDEHA	69972325	Pandawai	1	32	32	
55	SMP NEGERI SATAP WALATUNGGA	50307984	Pandawai	1	32	32	
56	SMP NEGERI 1 PINU PAHAR	50303791	Pinu Pahar	3	32	96	
57	SMP NEGERI SATAP KANJILUMURU	69774692	Pinu Pahar	1	32	32	
58	SMP NEGERI SATAP OKATANA	69727874	Pinu Pahar	1	32	32	

59	SMP NEGERI SATAP UMANDUNDU	50305760	Pinu Pahar	1	32	32	
60	SMP NEGERI 1 RINDI	50303790	Rindi	2	32	64	
61	SMP NEGERI 2 RINDI	50307990	Rindi	3	32	96	
62	SMP NEGERI SATAP TAMBURI	50307982	Rindi	1	32	32	
63	SMP NEGERI 1 TABUNDUNG	50303787	Tabundung	4	32	128	
64	SMP NEGERI SATAP KAHEMBI	50305759	Tabundung	1	32	32	
65	SMP NEGERI 1 UMALULU	50303788	Umalulu	8	32	256	
66	SMP NEGERI 2 UMALULU	50305765	Umalulu	1	45	**45**	Jumlah Siswa Dengan Pengecualian
67	SMP NEGERI SATAP PADAMMU	50305754	Umalulu	2	32	64	
68	SMP NEGERI 1 WULLA WAIJELU	50303785	Wulla Waijelu	3	32	96	
69	SMP NEGERI 2 WULLA WAIJILU	50307991	Wulla Waijelu	3	32	96	

e. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Swasta

No	**Nama Satuan Pendidikan**	**NPSN**	**Kecamatan**	**Jumlah Rombel Kelas Awal**	**Jumlah Siswa Per Rombel**	**Daya Tampung**	**Keterangan**
1	SMP KATOLIK ANDALURI	50303770	Kota Waingapu	5	32	160	
2	SMP KATOLIK PADADITA	50303765	Kambera	3	32	96	
3	SMP KETRAMPILAN LEWA	50303769	Lewa	3	32	96	
4	SMP KRISTEN NASIONAL PLUS KASIH AGAPE	69774693	Kota Waingapu	2	32	64	
5	SMP KRISTEN PAYETI	50303768	Kambera	3	32	96	
6	SMP MUHAMMADIYAH WAINGAPU	50303767	Kota Waingapu	2	32	64	
7	SMP PGRI WAINGAPU	50303766	Kanatang	3	32	96	
8	SMP PRAIPULUHAMU	69899657	Rindi	1	32	32	

f. Simulasi Daya Tampung Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Rumus Perhitungan Daya Tampung;
Daya Tampung = Jumlah Ruang Kelas 1 X 32 Murid maksimal dalam satu kelas.

DT = 201 x 32
= 6.432

Total Daya Tampung Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta Kabupaten Sumba Timur adalah 6.432.

Ilustrasi Kondisi Daya Tampung SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut;

- Jumlah lulusan SD/sederajat sebanyak 5.420;
- Daya tampung Murid SMP Negeri/Swasta kelas 7 sebanyak 6.432;

Perhitungan kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut:

Kondisi daya tampung kelas 7 = 6.432 – 5.420

= 1.012

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta, kapasitas daya tampung SMP negeri dan swasta yang diselenggarakan Kabupaten Sumba Timur mencukupi.

II. Satuan Pendidikan Wajib SPBM Tahun Pelajaran 2025/2026

a. Sekolah Dasar (SD)

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Kecamatan
1	SD INPRES ANANJAKI	50303866	Karera
2	SD INPRES HAMBAWUTANG	50303879	Ngadu Ngala
3	SD INPRES KALU	50303875	Kambera
4	SD INPRES KALUMBANG	50303874	Kambera
5	SD INPRES KAMALAPUTI	50303873	Kota Waingapu
6	SD INPRES KAWANGU 1	50303851	Pandawai
7	SD INPRES KAWANGU 2	50303933	Pandawai
8	SD INPRES LAIPORI	50303829	Pandawai
9	SD INPRES MALUMBI	50303845	Kambera
10	SD INPRES MENGGIT TIMBI	50303843	Pandawai
11	SD INPRES MONDU LA PATAMA	50303842	Lewa
12	SD INPRES NANGGA LINDI WATU	50303839	Lewa
13	SD INPRES PADADITA	50303913	Kambera
14	SD INPRES PAPINDUNG	50303923	Kambera
15	SD INPRES POLIWALI	50303920	Nggaha Ori Angu
16	SD INPRES TANAMANANG	50303927	Pahunga Lodu
17	SD INPRES UMABARA	50303940	Umalulu
18	SD INPRES UMAMAPU	50303941	Kota Waingapu
19	SD INPRES WAINGAPU 2	50303934	Kota Waingapu
20	SD INPRES WAINGAPU 3	50303932	Kota Waingapu
21	SD INPRES WATUPUDA	50303896	Umalulu
22	SD KATOLIK ANDALURI	50303859	Kota Waingapu
23	SD KATOLIK LONDA LIMA	50303858	Kanatang
24	SD KATOLIK PRAIKUNDU	50303855	Kambera
25	SD MASEHI ANDUWATU	50303910	Matawai La Pawu
26	SD MASEHI BAING	50303909	Wulla Waijelu
27	SD MASEHI KAPUNDUK	50303902	Haharu
28	SD MASEHI LALINDI	50303743	Karera
29	SD MASEHI LAMBANAPU	50303742	Kambera
30	SD MASEHI LUMBUMENGGIT	50303739	Kambera
31	SD MASEHI MATAWAI	50303737	Pahunga Lodu
32	SD MASEHI MBURUKULU	50303733	Pahunga Lodu
33	SD MASEHI MELOLO 2	50303746	Umalulu
34	SD MASEHI PATAWANG	50303747	Umalulu
35	SD MASEHI PAU	50303759	Umalulu
36	SD MASEHI PAYETI 1	50303758	Kambera
37	SD MASEHI PAYETI 2	50303757	Kambera

38	SD MASEHI TANARONG	50303750	Karera
39	SD MASEHI TAWAKIHU	50303748	Katala Hamu Lingu
40	SD MASEHI WAI WEI	50303712	Lewa
41	SD NEGERI HANGGARORU	50303725	Rindi
42	SD NEGERI KANDANGU BUKU	50303717	Umalulu
43	SD NEGERI LAI HAU	50303726	Lewa Tidahu
44	SD NEGERI LAMBAKARA	50303723	Pahunga Lodu
45	SD NEGERI LINDI	50305724	Pandawai
46	SD NEGERI MAUMARU	50303862	Paberiwai
47	SD NEGERI NDULALURI	50303803	Lewa
48	SD NEGERI PADAMMU	50303800	Umalulu
49	SD NEGERI TAIMANU	50303794	Kanatang
50	SD NEGERI TANALINGU	50303808	Rindi
51	SD NEGERI WAINGAPU 4	50303931	Kota Waingapu
52	SD NEGERI WAINGGAI	50303817	Kota Waingapu
53	SD NEGERI WATUMBAKA	50303813	Pandawai

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	**Nama Satuan Pendidikan**	**NPSN**	**Kecamatan**
1	SMP NEGERI 1 KAMBERA	50307986	Kambera
2	SMP NEGERI 1 WAINGAPU	50303786	Kambera
3	SMP NEGERI 4 MAULIRU	50305764	Kambera
4	SMP NEGERI 2 KANATANG	50305763	Kanatang
5	SMP NEGERI 2 WAINGAPU	50303782	Kota Waingapu
6	SMP NEGERI 3 WAINGAPU	50303781	Kota Waingapu
7	SMP NEGERI 1 LEWA	50303763	Lewa
8	SMP NEGERI 1 PAHUNGA LODU	50303780	Pahunga Lodu
9	SMP NEGERI 1 PANDAWAI	50303778	Pandawai
10	SMP NEGERI 1 UMALULU	50303788	Umalulu
11	SMP NEGERI 1 WULLA WAIJELU	50303785	Wulla Waijelu
12	SMP NEGERI 2 WULLA WAIJILU	50307991	Wulla Waijelu

III. Pembobotan Jalur Prestasi SPBM

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berprestasi dengan Rata rata Nilai Rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan jumlah nilai rata - rata minimal 75 atau dengan piagam penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota untuk juara I,II,III.

Pola pembobotan diatur sebagai berikut:

1. Nilai Raport 5 (lima) semester (2 semester di kelas IV, 2 semester di kelas V dan semester I di kelas VI) .
2. Pembobotan nilai sertifikat/piagam prestasi sebagai berikut:

JUARA I

LEVEL	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	100	97
Nasional	75	72
Provinsi	50	47
Kabupaten/Kota	25	22

JUARA II

LEVEL	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	95	92
Nasional	70	67
Provinsi	45	42
Kabupaten/Kota	20	17

JUARA III

LEVEL P	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	90	87
Nasional	65	62
Provinsi	40	37
Kabupaten/Kota	15	12

Ditetapkan di : Waingapu
pada tanggal : 26 Maret 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumba Timur

Erwin Pasande, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19720513 200012 1 002